



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Berkelanjutan Pencapaian Tujuan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
26. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Berkelanjutan Tujuan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
38. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132)
42. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

50. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 48);
51. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 66);
52. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi :

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026; dan
- c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB IV
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Bab V Penutup.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dokumen Rencana Kerja :
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
 - g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
 - h. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
 - i. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;
 - j. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
 - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
 - n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;
 - o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
 - q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;

- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik;
 - t. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
 - u. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
 - v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
 - w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
 - x. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik;
 - y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
 - z. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
 - aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
 - bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;
 - cc. Kecamatan Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas;
 - ee. Kecamatan Manyar;
 - ff. Kecamatan Cerme;
 - gg. Kecamatan Benjeng;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan;
 - jj. Kecamatan Driyorejo;
 - kk. Kecamatan Wringinanom;
 - ll. Kecamatan Kedamean;
 - mm. Kecamatan Menganti;
 - nn. Kecamatan Sidayu;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah;
 - pp. Kecamatan Panceng;
 - qq. Kecamatan Bungah;
 - rr. Kecamatan Dukun;
 - ss. Kecamatan Sangkapura; dan
 - tt. Kecamatan Tambak.
- (3) Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta dokumen perencanaan lainnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 23 Oktober 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 23 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 78

RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GRESIK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pertanian Kabupaten Gresik memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, dan pembangunan ekonomi daerah berbasis sektor pertanian. Tahun 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat sistem pertanian tangguh dan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas, ketahanan pangan, dan keamanan pangan daerah. Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Gresik. Selain berperan penting dalam penyediaan pangan, sektor ini juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan, serta menjaga ketahanan pangan daerah. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian, pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan memiliki mandat untuk mengelola potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia pertanian secara berkelanjutan.

Memasuki tahun 2026, tantangan pembangunan pertanian semakin kompleks. Perubahan iklim, degradasi lahan, fluktuasi harga komoditas, keterbatasan sarana produksi, serta penurunan minat generasi muda terhadap sektor pertanian menjadi isu strategis yang perlu diantisipasi. Di sisi lain, perkembangan teknologi pertanian dan digitalisasi membuka peluang untuk peningkatan efisiensi, produktivitas, serta nilai tambah produk pertanian.

Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2026 disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2026. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh kegiatan operasional Dinas Pertanian selama satu tahun anggaran, yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan pertanian.

Dinas Pertanian Kabupaten Gresik bertanggung jawab untuk melaksanakan Misi Kedua dan Misi Kelima. Berdasarkan Misi Kedua ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung optimalisasi potensi daerah yang berdaya saing dan Sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi ekonomi lokal. Selain itu, berdasarkan Misi Kelima ditetapkan Tujuan

RPJMD yaitu Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan dan sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas diberbagai aspek kesejahteraan dan Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan dan Menghapus Ketimpangan Social Ekonomi. Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut maka Dinas Pertanian Kabupaten Gresik menetapkan Tujuan Renstra dan Sasaran Renstra yaitu:

Tujuan Renstra Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian

Tujuan pembangunan sektor pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 dirumuskan untuk menjawab isu-isu strategis sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Gresik.

Sasaran renstra

1. Meningkatnya produksi sektor pertanian
2. Meningkatnya ketahanan pangan
3. Meningkatnya pengendalian inflasi sektor pertanian
4. Meningkatnya kesejahteraan petani

Sasaran Renstra adalah penjabaran lebih spesifik dari tujuan, bersifat terukur, kuantitatif, dan kualitatif serta menunjukkan target kinerja yang akan dicapai setiap tahun hingga akhir periode Renstra.

Mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah antara lain Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah; Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah; Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Selanjutnya Renja PD yang telah disusun akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas yang kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik adalah:

- a. Undang- undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- m. Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian

Kabupaten Gresik;

- n. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2024;

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Gresik disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Kabupaten Gresik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
- c. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD dan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun n-2 dan tahun n-3) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaannya dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pertanian

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik pada tahun 2026 terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Program yang termasuk Urusan Wajib sebanyak 4 Program dan Urusan Pilihan sebanyak 7 Program.

Program wajib meliputi (1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan terdiri dari Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya; Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik (2) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat terdiri dari 2 kegiatan yaitu Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan sub kegiatan pendukung yaitu Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya; Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia; Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota; Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan; Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM). Kegiatan yang kedua adalah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota. Kegiatan ketiga adalah Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (3) Program Penanganan Kerawanan Pangan terdiri dari 2 kegiatan yaitu Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dengan sub kegiatan pendukung Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan Kerentanan Pangan dan Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan

Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (4) Program Pengawasan Keamanan Pangan terdiri dari Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan; dan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan PrasaranaPengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.

Program Pilihan terdiri dari 7 program yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (3) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian (4) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (5) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (6) Program Perizinan Usaha Pertanian (7) Program Penyuluhan Pertanian. Dari total 7 program pilihan tersebut di dukung dengan 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 42 (empat puluh dua) Sub Kegiatan (Terlampir dalam tabel 2.1 T-C.29).

Adapun Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pertanian akan di jabarkan sebagai berikut:

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET 2024	Realisas i2024	Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	%	100%	100%	100%
2	PROGRAM PENYEDIAANDAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	prosentase realisasi pupuk bersubsidi	%	96,5%	81.3%	84.23%
		prosentase alsintan dalam kondisi baik	%	90,7%	92,61%	100.28%
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas lahan LP2B dan LCP2B yang terlindungi	Ha	27721 ha	27721 ha	100%
		Persentasi Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Infrastruktur Pertanian	%	35,86%	32,66%	91,08%
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase kondisi ternak sehat	%	88,2%	88,34%	100,45%

5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	%	82,64%	100%	124,20%
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluh bersertifikat	%	40,98%	88,68%	216,38%
		Persentase kelompok tani dengan klasifikasi Madya	%	15,92%	16,65%	104,61%
7	PROGRAM PERIZINAN PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang memiliki izin	%	50%	100%	200%
8	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Stabilitas Harga Pangan Utama (Beras)	%	10,00%	9,39%	93,86%
9	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kualitas konsumsi Pangan yang diindikasikan oleh skor Pola pangan harapan (PPH)	%	86,5%	93,6%	108,21%
10	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Segar	%	81%	100,00%	123,46%
11	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	14%	15,79%	115,79%

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Secara umum Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja SKPD Dinas Pertanian tahun 2023 yang belum memenuhi target sebanyak 3 Program yaitu Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian pada indikator Prosentaserealisasi Pupuk bersubsidi dari target Sebesar 96.5% realisasi 81.3% capaian kinerja 84.23 % , Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian realisasi Sebesar 80.51% dengan capaian kinerja 97.91%, Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian pada indicator prosentase poktan/gapoktan terfasilitasi infrastruk pertanian dari target 35,86% realisasi 32.66% dengan capaian kinerja 91.08 dan program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan dengan realisasi dari target 10 terealisasi 9.39% dan capaian kinerja 92.86%
- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program Dinas pertanian yang memenuhi target Kinerja sebanyak 7 Program yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota target 100%, realisasi 100% dan capaian 100%
 - Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner target 88.2 %, realisasi 88,34% dan capaian 100,45%
 - Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian target 82,64%, realisasi 100% dan capaian 124,20%
 - Program Penyuluhan Pertanian pada indikator Persentase penyuluh bersertifikat target 40,98%, realisasi 88,68% dan capaian 216,38%, pada indikator Persentase kelompok tani dengan klasifikasi Madya target 15,92%, realisasi 16,65% dan capaian 104,61%
 - Program Perizinan Pertanian target 50%, realisasi 100% dan capaian 200%
 - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat target 86,5%, realisasi 93,6% dan capaian 108,21%
 - Program Pengawasan Keamanan Pangan target 81%, realisasi 100% dan capaian 123,46%
 - Program Penanganan Kerawanan Pangan target 14%, realisasi 15,79% dan capaian 115,79%
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner target 88.2 %, realisasi 88,34% dan capaian 100,45% besarnya angka realisasi menunjukkan penyakit ternak menular tertangani dengan baik.
 - Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian target 82,64%,realisasi 100% dan capaian 124,20%, angka tersebut menunjukkan serangan OPT tertangani dan petani terdampak banjir dan kekeringan terfasilitasi bantuan.
 - Program Penyuluhan Pertanian pada indikator Persentase penyuluh bersertifikat target 40,98%,realisasi 88,68% dan capaian 216,38%, artinya 88,68% penyuluh telah terfasilitasi untuk melaksanakan sertifikasi sedangkan pada indikator Persentase kelompok tani dengan klasifikasi Madya target 15,92%,realisasi 16,65% dan capaian 104,61% artinya terdapat kenaikan kelas dari kelas kelompok lanjut menjadi madya.

- Program Perizinan Pertanian target 50%,realisasi 100% dan capaian 200% hal tersebut menunjukkan seluruh perizinan pertanian sudah terfasilitasi
 - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat target 86,5%,realisasi 93,6% dan capaian 108,21% artinya masyarakat Gresik telah mengkonsumsi makanan secara beragam
 - Program Pengawasan Keamanan Pangan target 81%,realisasi 100% dan capaian 123,46% Program Penanganan Kerawanan Pangan target 14%, realisasi 15,79% dan capaian 115,79%. Hasil uji laboratorium produk asal tumbuhan baik dan tidak berbahaya serta aman dikonsumsi. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Faktor utama tidak tercapainya target pada Dinas pertanian umumnya adalah iklim yang mempengaruhi jadwal tanam dan serangan hama dan penyakit tanaman sehingga menurunkan produksi pertanian, serta keterbatasan akses permodalan yang berpengaruh dalam penyerapan pupuk bersubsidi serta pemenuhan sarana produksi lainnya.
 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Dampak yang secara umum di timbulkan dari factor-faktor yang mempengaruhi capaian target Kinerja pada Renja 2021 adalah capaian angka realisasi kurang maksimal yakni kurang dari 100% Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Tindakan perencanaan dan Penganggaran yang dilaksanakan adalah dengan mengoptimalkan dana bantuan baik dari DAK,DBHCHT maupun dana dari APBD1 DAN APBN.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Gresik
Dinas Pertanian

[illegible]

2	9	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Stabilitas Harga Pangan Utama (Beras)	-	-	10	200,00	20	-	-	100%
						Jumlah Produksi Pangan Lokal	-	-	-	-	-	>190000	>190000	
						Persentase Jumlah Cadangan Pangan	-	-	-	-	-	0,35	0,35	
2	9	2	02.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kemandirian pangan yang tersedia	1 Unit	0	63	59	0,94	0	0	
2	9	2	02.01	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	-	-	-	-	-	0	0	
2	9	2	02.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	1 Unit	0	1	1	1	1 Laporan	1 Laporan	
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola	-	-	86,50	93,86	1,09	-	-	100%

					Pangan Harapan (PPH)									
					Pertumbuhan Pola Pangan Harapan	-	-	-	-	-	0,01	0,01		
					Persentase rumah tangga yang menerapkan pola konsumsi B2SA	-	-	-	-	-	>40%	>40%		
2	9	3	02.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	1 Laporan	1 laporan	1	1	1	12 laporan	12 laporan	
					Layanan Pangan Berbasis Elektronik	-	-	4	0	0	-	-		
2	9	3	2.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	2 Unit	2 Unit	-	-	-	-	-	

2	9		02.01	3	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	-	-	1	1	1	12 laporan	12 laporan	
2	9	3	02.01	6	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	-	-	2	2	1	-	-	
2	9	3	02.01	10	Pengembangan kelembagaan distribusi pangan kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan distribusi pangan	-	-	2	2	1	2 Unit	2 Unit	
2	9	3	02.01	15	Pemantauan harga dan pasokan pangan	Informasi harga dan pasokan pangan	-	-	2	2	1	2 Dokumen	2 Dokumen	
2	9	3	02.01	16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	-	-	2	2	1	1 Dokumen	1 Dokumen	
		3				Layanan Pangan Berbasis Elektronik	-	-	4	0	0	-	-	
2	9	3	02.01	14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	-	-	-	-	-	0	0	

2	9		02.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase kelompok wanita tani yang diberdayakan	19%	19,66	20	22,47	1,12	-	-	
						Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	
2	9	3	02.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	1	1	1	1 Laporan	1 Laporan	
						Jumlah Kelompok Masyarakat Penerima Manfaat	2 Kelompok	2 Kelompok	-	-	-	-	-	
						Jumlah Event yang di ikuti	1 Kali	0	-	-	-	-	-	
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	-	-	14	123,46	8,82	>16%	>16%	100%
2	9	4	02.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Informasi desa rawan pangan	4 desa	4 desa	1	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	

2	9	4	02.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	
2	9	4	02.02		Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan penanganan kerawanan pangan	-	-	2	2	1	2 Laporan	2 Laporan	
2	9	4	02.02	2	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	-	-	1	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	
2	9	4	02.02	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	-	-	1	1	1	1 Laporan	1 Laporan	
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Segar	-	-	81	108,21	1,34	86%	86%	100%
2	9	5	02.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan keamanan pangan segar	1 Laporan	1 Laporan	3	3	1	2 Laporan	2 Laporan	

2	9	5	02.01	6	Rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	-	-	1	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	
2	9	5	02.01	7	Penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	2	2	1	1 Dokumen	1 Dokumen	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kapasitas internal organisasi	-	-	A	AA				100%
						Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%	100	100	1	100%	100%	
3	27	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	40	40	1	2 Dokumen	2 Dokumen	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang disusun			48	48	1	-	-	

3	2 7	1	02. 01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	40	40	1	40 Dokumen	40 Dokumen	
3	2 7	1	02. 01	6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	48	48	1	48 Laporan	48 Laporan	
3	2 7	1	02. 01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	18	18	1	-	-	
3	2 7	1	02. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	122 orang/bul an	122 orang/bula n	190	111	0,58	12 laporan	12 laporan	
						Jumlah buku laporan keuangan	108 Buku	108 Buku	118	118	1	-	-	
3	2 7		02. 02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	122 orang/bul an	122 orang/bula n	190	111	0,58	122 Orang/B ulan	122 Orang/B ulan	
		1				Jumlah gaji dan tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	-	

3	2 7		02. 02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	103	103	1	103 Dokumen	103 Dokumen	
						Jumlah buku pedoman pelaksanaan APBD	8 Buku	8 Buku	-	-	-	-	-	
		1				Jumlah laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	108 Buku	108 Buku	-	-	-	-	-	
3	2 7	1	02. 02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	8 Laporan	8	8	1	8 Laporan	8 Laporan	
3	2 7	1	02. 02	8	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	-	-	7	7	1	7 Dokumen	7 Dokumen	
3	2 7	1	02. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	4	4	1	8 Paket	8 Paket	

						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	3	3	1	3 Paket	3 Paket	
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	-	1	1	1	4 Paket	4 Paket	
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	48	48	1	48 Laporan	48 Laporan	
						Jumlah pelaksanaan kegiatan pengadministrasian umum perangkat daerah	-	-	-	-	-	12 laporan	12 laporan	
3	27	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	4	4	1	8 Paket	8 Paket	
3	27	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3	3	1	3 Paket	3 Paket	

3	27	1	02.06	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	-	1	1	1	4 Paket	4 Paket	
3	27	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	48	48	1	48 Laporan	48 Laporan	
3	27	1	02.06	11	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	1	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	
3	27	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3	3	1	12 laporan	12 laporan	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92 Laporan	92 Laporan	93	93	1	-	-	
3	27	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3	3	1	4 Laporan	4 Laporan	

3	2 7	1	02. 08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	92 Laporan	92 Laporan	93	93	1	90 Laporan	90 Laporan	
3	2 7	1	02. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	45 Unit	45 Unit	12	12	1			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3	3	1			
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	1	1	1			
3	2 7	1	02. 09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2	2	1	2 Unit	2 Unit	
3	2 7	1	02. 09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan Pajak Perizinannya	43 Unit	43 Unit	10	10	1	10 Unit	10 Unit	

3	2 7	1	02. 09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	3	3	1	4 Unit	4 Unit	
3	2 7	1	02. 09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bnagunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direh abilitasi	-	-	1	1	1	1 Unit	1 Unit	
3	2 7	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase realisasi pupuk bersubsidi	-	-	96,5	100,0	1,04	90%	90%	100%
						Persentase alsintan dalam kondisi baik	-	-	90,7	84,23	0,93	>90%	>90%	
3	2 7	2	02. 01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan dan Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	17	17	1	3 laporan	3 laporan	
3	2 7		02. 01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	16 Laporan	16 Laporan	16	16	1	2 Laporan	2 Laporan	
						Benih Tembakau	100 Pack	98 Pack	-	-	-	-	-	
						Fungisida	200 Pack	196 Pack	-	-	-	-	-	

						Handsprayer	298 Unit	295 Unit	-	-	-	-	-	
						Handtraktor	23 Unit	11 Unit	-	-	-	-	-	
						Insektisida	100 Pack	98 Pack	-	-	-	-	-	
						Intensifikasi Tanaman Tembakau	100 Ha	98 Ha	-	-	-	-	-	
						Penerima Hibah Handsprayer	13 Kelompok	45 Kelompok	-	-	-	-	-	
						Penerima Hibah PHC	142 Kelompok	138 Kelompok	-	-	-	-	-	
						Penerima Hibah POC	60 Kelompok	60 Kelompok	-	-	-	-	-	
						Penerima Hibah Pokir	20 Kelompok	15 Kelompok	-	-	-	-	-	
						Plastik UV	2500 meter	2450 meter	-	-	-	-	-	
						Pupuk Non Subsidi NPK	1000 kg	980 kg	-	-	-	-	-	
						Pupuk Non Subsidi SP36	15000 kg	14700 kg	-	-	-	-	-	
						Pupuk Non Subsidi ZA	20000 kg	19600 kg	-	-	-	-	-	
						Pupuk Non Subsidi ZK	10000 kg	9800 kg	-	-	-	-	-	
		2				Terpal	3 Unit	3 Unit	-	-	-	-	-	
3	2 7	2	02. 01	2	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	-	-	1	1	1	1 Laporan	1 Laporan	

3	2 7	2	02. 03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan	1 Laporan	1 Laporan	1	1	1	1 laporan	1 laporan	
3	2 7		02. 03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	1 Laporan	1	1	1	1 Laporan	1 Laporan	
		2				Jumlah Peralatan Sarana Pembibitan	1 Jenis	1 Jenis	-	-	-	-	-	
3	2 7	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas lahan LP2B dan CLP2B yang terlindungi	-	-	27.7 21	27.72 1	1			100%
						Persentase Lahan KP2B yang Mendapatkan Insentif Prasarana Pertanian	-	-	-	-	-	50%	50%	
						Persentase poktan/gapoktan yang terfasilitasi infrastruktur pertanian	-	-	35,8 6	32,66	0,91	33%	33%	

3	2 7	3	02. 01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas lahan yang divalidasi	1 Dokumen	0	1	0	0			
						Jumlah peta LP2B	1 Dokumen	0	1	0	0			
						Jumlah pengawasan pembangunan prasarana pendukung pertanian	1 Laporan	1 Laporan	2	2	1			
						Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	-	-	-	3 Laporan	3 Laporan	
3	2 7		02. 01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	2	2	1	2 Laporan	2 Laporan	
		3				Jumlah pengadaan mesin perajang	0 Unit	0 Unit	-	-	-			
						Jumlah pengadaan widik dan terpal	2 Jenis	2 Jenis	-	-	-			
3	2 7	3	02. 01	7	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pascapanen perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	-	-	1	1	1	10 Unit	10 Unit	

3	2 7	3	02. 01	1 6	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L P2B	-	-	-	-	-	0	0	
3	2 7	3	02. 02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	9 Unit	9 Unit	24	9	0,38	4 unit	4 unit	
3	2 7	3	02. 02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	-	-	-	-	-	0	0	
3	2 7	3	02. 02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit	4	4	1	0	0	
3	2 7	3	02. 02	8	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	-	-	15	0	0	0	0	
3	2 7	3	02. 02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	4	4	1	4 Unit	4 Unit	

						dan Dipelihara									
3	2 7	3	02. 02	1 0	Rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	-	-	1	1	1	0	0		
3	2 7	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase kondisi ternak sehat	-	-	88,2	91,08	1,03	-	-	100%	
						Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	-	-	-	-	-	0	0		
3	2 7	4	02. 01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular	1 Laporan	1 Laporan	2	2	1	2 laporan	2 laporan		
3	2 7	4	02. 01	7	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	-	-	-	-	-	0	0		

3	2 7		02. 01	8	Pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	3 Laporan	3 Laporan	12	12	1	12 laporan	12 laporan	
						Jumlah Obat Pelayanan Kesehatan Hewan	2 Paket	2 Paket	-	-	-	-	-	
						Jumlah Obat Pencegahan Penyakit Hewan	7 Jenis	2 Jenis	-	-	-	-	-	
		4				Jumlah Obat Penyakit Mulut dan Kuku	2 Paket	2 Paket	-	-	-	-	-	
3	2 7	4	02. 02		Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota	Jumlah pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan	-	-	1	1	1	1 laporan	1 laporan	
3	2 7	4	02. 02	4	Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	-	-	1	1	1	1 laporan	1 laporan	

3	2 7	4	02. 03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner	3 Laporan	2 Laporan	1	1	1	-	-	
3	2 7	4	02. 03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3 Laporan	2 Laporan	2	2	1	-	-	
3	2 7	4	02. 04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	-	-	1	1	1	3 laporan	3 laporan	
						layanan peternakan berbasis elektronik	-	-	4	0	0			
						Jumlah unit usaha yang mengikuti pendampingan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-			
						Jumlah jenis produk hewan yang diawasi	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-			
3	2 7	4	02. 04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	12 Laporan	12	12	1	1 laporan	1 laporan	
3	2 7	4	02. 04	4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pengujian laboratorium kesehatan	-	-	1	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	

						masyarakat veteriner								
3	2 7	4	02. 04	1 0	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik.	-	-	1	1	1	2 Unit	2 Unit	
3	2 7	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	-	82,6 4	100	1,22	92%	92%	100%
						Persentase Penanganan Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	-	-	-	-	-	90%	90%	
3	2 7	5	02. 01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	4 Laporan	4 Laporan	1	1	1			
						layanan pertanian berbasis elektronik	-	-	4	0	0			

3	2 7	5	02. 01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1044,45 Ha	295,6 Ha	104 3	2312, 4	2,22	180 Ha	180 Ha	
						Layanan pertanian berbasis elektronik	-	-	4	0	0	-	-	
						Evaluasi kegiatan perlindungan perkebunan	25 Orang	25 Orang	-	-	-	-	-	
						Fasilitasi Rencana Penerapan Asuransi Tembakau	120 Orang	0	-	-	-	-	-	
						Jumlah Penerima Hibah	22 Kelompok	22 kelompok	-	-	-	-	-	
						Jumlah peserta Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	198 Orang	198 Orang	-	-	-	-	-	
						Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Hortikultura	20 Orang	20 Orang	-	-	-	-	-	

						dan Perkebunan (APBD)								
						Koordinasi kegiatan perlindungan perkebunan	60 Orang	60 Orang	-	-	-	-	-	
3	2 7		02. 01	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	3169,6 Ha	1030,6 Ha	549 6	8	0,001	107 Ha	107 Ha	
		5				Jumlah pertemuan pendukung kegiatan	4 Kegiatan	0	-	-	-	-	-	
3	2 7		2.0 1	3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	52 Ha	52 ha	-	-	-	-	-	
						Jumlah Peserta Penguatan Mutu Tanaman Perkebunan	20 Orang	20 orang	-	-	-	-	-	

		5				Jumlah Peserta Pertemuan Forum Temu Kemitraan (FTK) Tanaman Tebu	50 Orang	50 orang	-	-	-	-	-	
3	2 7	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang memiliki izin	-	-	50	104,6 107	2,09	100%	100%	100%
3	2 7	6	02. 01		Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah rekomtek izin usaha pertanian yang diterbitkan	-	-	1	1	1	2 Dokumen	2 Dokumen	
3	2 7	6	02. 01	2	Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian	Jumlah penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian	-	-	1	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	
3	2 7	6	02. 01	5	Pembinaan dan pengawasan penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	-	-	1	1	1	1 Laporan	1 Laporan	
3	2 7	6	02. 02		Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomtek izin usaha peternakan yang diterbitkan	-	-	1	1	1	1 Laporan	1 Laporan	

3	2 7	6	02. 02	6	Pengawasan pelaksanaan izin usaha rumah sakit hewan, klinik hewan, ambulatori, praktik dokter hewan mandiri/puskesmas mandiri, tempat pelayanan paramedik veteriner atau pasar hewan	Jumlah izin usaha unit rumah sakit hewan, klinik hewan, ambulatori, praktik dokter hewan mandiri/puskesmas mandiri, tempat pelayanan paramedik veteriner atau pasar hewan yang diawasi.	-	-	1	1	1	1 Laporan	1 Laporan	
3	2 7	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh Bersertifikat	-	-	40,9 8	88,68	2,16			100%
						Persentase kelompok tani dengan klasifikasi madya	-	-	15,9 2	16,65	1,05			
						Persentase Kelompok Tani Semua Jenjang Naik Kelas	-	-	-	-	-	1%	1%	
3	2 7	7	02. 01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan	16 Unit	16 unit	16	16	1	16 Unit	16 Unit	
						Jumlah kelompok tani yang meningkat kelasnya	40 Poktan	40 poktan	40	40	1	-	-	

						Jumlah kelompok tani yang difasilitasi kartu Go Tani	-	-	293	304	1,038	-	-	
						Jumlah kelompok tani yang mengikuti sekolah lapang	40 Poktan	39 poktan	40	40	1	-	-	
3	2 7		02. 01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16 Unit	16 unit	16	16	1	16 Unit	16 Unit	
		7				Jumlah BPP yang mendapat Alokasi DAK Non Fisik	16 BPP	16 BPP	-	-	-	-	-	
3	2 7		02. 01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Unit	40 unit	40	40	1	40 Unit	40 Unit	
						Jumlah pembinaan dan pelatihan kelembagaan petani tembakau	3 Kali	3 kali	-	-	-	-	-	
						Jumlah pengembangan Agribisnis tembakau	70 Orang	70 orang	-	-	-	-	-	

					Jumlah peserta adopsi inovasi budidaya tembakau lokal	10 Orang	10 orang	-	-	-	-	-	
					Jumlah peserta pelatihan pembuatan pupuk organik	15 Kelompok	15 kelompok	-	-	-	-	-	
					Jumlah peserta pelatihan pengolahan pasca panen teknik jantur(DBHCHT)	40 Orang	40 orang	-	-	-	-	-	
					Jumlah peserta pelatihan teknik perajangan tembakau (DBHCHT)	60 Orang	60 orang	-	-	-	-	-	
					Jumlah peserta temu lapang (DBHCHT)	100 Orang	100 orang	-	-	-	-	-	
		7			Jumlah sekolah lapang tahap penumbuhan (DBHCHT)	6 Kali	6 kali	-	-	-	-	-	
3	2 7		02. 01	3	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	1 Unit	1 unit	2	11	5,5	0	0
					Jumlah Aplikasi Go Tani	1 Paket	1 paket	-	-	-	-	-	
		7			Jumlah sosialisasi Go Tani	2 Kali	0	-	-	-	-	-	

3	2 7	7	02. 01	5	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi	-	-	3	3	1	0	0	
3	2 7	7	02. 01	6	Penyediaan dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	-	50	50	1	-	-	
3	2 7	7	02. 01	7	Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	-	-	1	1	1	-	-	
3	2 7		02. 01	9	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	-	-	1	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	
UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng														
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	2 7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3	2 7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kapasitas internal organisasi	-	-	A	AA				100%

						Persentase ketercapaian sasaran program OPD	-	-	100	100	1	100%	100%	
3	27	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1	1	1	-	-	
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1	1	1	-	-	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	12	12	1	-	-	
						Jumlah pelaksanaan kegiatan pengadministrasian umum perangkat daerah	-	-	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	
3	27	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1	1	1	1 Paket	1 Paket	
3	27	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1	1	1	1 Paket	1 Paket	

3	2 7	1	02. 06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	12	12	1	1 laporan	1 laporan	
3	2 7	1	02. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12	12	1	12 Laporan	12 Laporan	
3	2 7	1	02. 08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12	12	1	12 Laporan	12 Laporan	
3	2 7	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase kondisi ternak sehat	-	-	88,2	91,08	1,033	-	-	100%
						Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	-	-	-	-	-	>90%	>90%	

3	2 7	4	02. 01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular	1 Laporan	1 Laporan	1	1	1	12 laporan	12 laporan	
3	2 7	4	02. 01	8	Pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	3 Laporan	3 Laporan	12	12	1	1 Laporan	1 Laporan	
UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggang														
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	2 7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3	2 7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kapasitas internal organisasi	-	-	A	AA				100%
						Persentase ketercapaian sasaran program OPD	-	-	100	100	1	100%	100%	

3	2 7	1	02. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1	1	1	-	-	
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1	1	1	-	-	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Lapora n	60 Laporan	12	12	1	-	-	
						Jumlah pelaksanaa n kegiatan pengadminist rasian umum perangkat daerah	-	-	-	-		3 Dokumen	3 Dokumen	
3	2 7	1	02. 06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1	1	1	1 Paket	1 Paket	
3	2 7	1	02. 06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1	1	1	1 Paket	1 Paket	
3	2 7	1	02. 06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Lapora n	60 Laporan	9	7	0,78	1 laporan	1 laporan	

3	27	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12	12	1	12 Laporan	12 Laporan	
3	27	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12	12	1	12 Laporan	12 Laporan	
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase kondisi ternak sehat	-	-	88,20%	91,08	103,26	-	-	100%
						Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	-	-	-	-	-	>90%	>90%	
3	27	4	02.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular	1 Laporan	1 Laporan	1	1	1	12 laporan	12 laporan	

3	2 7	4	02. 01	8	Pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	3 Laporan	3 Laporan	12	12	1	1 Laporan	1 Laporan	
UPT Taman Teknologi Pertanian														
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	2 7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3	2 7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kapasitas internal organisasi	-	-	A	AA				100%
						Persentase ketercapaian sasaran program OPD	-	-	100	100	1	100%	100%	
3	2 7	1	02. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1	1	1	1 Paket	1 Paket	
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1	1	1	1 Paket	1 Paket	

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	12	12	1	12 Laporan	12 Laporan	
3	27	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1	1	1	1 Paket	1 Paket	
3	27	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1	1	1	1 Paket	1 Paket	
3	27	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	12	12	1	12 Laporan	12 Laporan	
3	27	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12	12	1	12 Laporan	12 Laporan	
3	27	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12	12	1	12 Laporan	12 Laporan	
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase realisasi pupuk bersubsidi	-	-	96,5	100,0	1,04	90%	90%	100%

						Persentase alsintan dalam kondisi baik	-	-	90,7	84,23	0,93	>90%	>90%	
3	2 7	2	02. 02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota		1 laporan	1	1	1	12 Laporan	12 Laporan	
3	2 7	2	02. 02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT Taman Teknologi Pertanian)	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen	12 Dokumen	12	12	1	12 Laporan	12 Laporan	
3	2 7	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas lahan LP2B dan CLP2B yang terlindungi	-	-	277 21	2772 1	1	-	-	100%
						Persentase poktan/gapoktan yang terfasilitasi infrastruktur pertanian	-	-	35,8 6	100,0 0	2,79	-	-	
3	2 7	3	02. 02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	9 Unit	9 Unit	1	1	1	4 Unit	4 Unit	

3	2 7	3	02. 02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit	1	1	1	4 Unit	4 Unit	
UPT RUMAH PEMOTONGAN HEWAN														
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	2 7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3	2 7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kapasitas internal organisasi			A	AA				100%
						Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%	100	100	1	100%	100%	
3	2 7	1	02. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12	12	1	5 laporan	5 laporan	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1	1	1	1 Paket	1 Paket	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1	1	1	1 Paket	1 Paket	

						Jumlah pelaksanaan kegiatan pengadministrasian umum perangkat daerah	-	-	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	
3	27	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12	12	1	5 laporan	5 laporan	
3	27	1	02.06	2	Penyediaan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1	1	1	1 Paket	1 Paket	
3	27	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1	1	1	1 Paket	1 Paket	
3	27	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12	12	1	12 laporan	12 laporan	
3	27	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12	12	1	12 Laporan	12 Laporan	

3	2 7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kapasitas internal organisasi			A	AA				100%
						Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%	100	100	1	100%	100%	
3	2 7	1	02.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1	1	1	1 Paket	1 Paket	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1	1	1	1 Paket	1 Paket	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Lapora n	60 Laporan	12	12	1	12 Laporan	12 Laporan	
						Jumlah pelaksana kegiatan pengadminist rasian umum perangkat daerah	-	-	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	
3	2 7	1	02.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1	1	1	1 Paket	1 Paket	

3	2 7	1	02. 06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1	1	1	1 Paket	1 Paket	
3	2 7	1	02. 06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	12	12	1	12 Laporan	12 Laporan	
3	2 7	1	02. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12	12	1	12 laporan	12 laporan	
3	2 7	1	02. 08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian di Bawean)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12	12	1	12 Laporan	12 Laporan	
3	2 7	1	02. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1	1	1	1 unit	1 unit	
3	2 7	1	02. 09	1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian di Bawean)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1	1	1	1 Unit	1 Unit	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 bidang urusan pangan dan pertanian yang menjadi tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik tahun 2025-2029. Penetapan indikator kinerja sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 (T-C.30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GRESIK

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi/Proyeksi Capaian				Cat a tan Ana lisis
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian (%)	0.477				2.87				
		Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan (%)	0.42				0.46				
		Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan (%)	2.03				2.02				
		Pertumbuhan produksi komoditas unggulan pertanian		0.46	0.46	0.47		0.46	0.46	0.47	
		Pertumbuhan produksi komoditas unggulan perkebunan		0.45	0.48	0.52		0.45	0.48	0.52	
		Pertumbuhan produksi komoditas unggulan peternakan		1.85	1.87	1.90		1.85	1.87	1.90	

2	Meningkatnya ketahanan pangan	Rasio ketersediaan pangan (kg/kapita /tahun)	190	184.88	185.73	186.59	184.04	184.88	185.73	186.59	
		Skor Pola Pangan Harapan		94.17	94.75	95.35		94.17	94.75	95.35	
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan		2.88	2.85	2.83		2.88	2.85	2.83	
		Indeks Ketahanan Pangan		80.61	81.32	82.03		80.61	81.32	82.03	
3	Meningkatnya Pengendalian Inflasi Sektor Pertanian	Stabilitas Harga Pangan Utama		4.68	4.68	4.70		4.68	4.68	4.70	
4	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Pertumbuhan PDRB Pertanian		0.73-2.30	0.85-2.60	0.92-2.90		0.73-2.30	0.85-2.60	0.92-2.90	

Dari tabel 2.2 di atas dapat di ketahui terjadi peningkatan produksi di sektor pertanian dengan realisasi 2.87% yang melampaui target 0.477%, begitu pula peningkatan produksi di sektor perkebunan dengan realisasi 0.46% dari target 0.42%, namun terjadi sedikit penurunan produksi di sektor peternakan sebesar 0.01%, sehingga perlu adanya program yang bisa mendukung peningkatan produktivitas komoditas unggulan peternakan agar tidak menimbulkan resiko jangka panjang.

Sedangkan pada indikator rasio ketersediaan pangan utama kinerja hampir mencapai target, terutama pada tahun 2024 realisasi 184,04 kg/kapita/tahun hanya sedikit di bawah target 190 kg/kapita/tahun. Capaian 96,86% menunjukkan ketersediaan pangan utama relatif terjaga, meski belum sepenuhnya sesuai target. Namun dibandingkan dengan konsumsi beras perkapita nasional yang senilai 79.08 kg/kapita/tahun, maka ketersediaan pangan di Kabupaten Gresik terjadi surplus.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD maupun hasil kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan pada Dinas Pertanian dapat dilihat dari indikator capaian kinerja pada sasaran yaitu meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan dengan indikator persentase peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian sebesar 601%, persentase peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan sebesar 110%, persentase peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan 99% serta meningkatnya ketahanan pangan dengan indikator Rasio ketersediaan pangan (kg/kapita/tahun) sebesar 96.86%.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Pertanian Kabupaten Gresik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, sesuai Pasal 6 huruf s, Dinas Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan Tipe A.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, sesuai Pasal 5 Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Pertanian Kabupaten Gresik, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pertanian yang meliputi prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan;
- b. pelaksanaan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. pengembangan prasarana pertanian penyediaan infrastruktur dan prasarana pendukung di bidang pertanian dan pangan;
- d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. peningkatan kualitas sumber daya aparatur, infrastruktur, prasarana pendukung dan produksi di bidang pertanian dan pangan;

- f. pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- g. pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan pengadaan pengawasan infrastruktur dan prasarana pendukung, pemasaran dan pengolahan hasil pertanian dan pangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan urusan pertanian dan urusan pangan;
- i. pelaksanaan tugas pembantuan urusan pertanian dan urusan pangan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Permasalahan mendasar yang dihadapi sektor pertanian adalah masih rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Gresik dan masih rendahnya pendapatan petani. Permasalahan tersebut disebabkan karena masih belum optimalnya tingkat produksi dan produktivitas pertanian serta belum optimalnya pemasaran hasil produk pertanian. Secara lebih rinci permasalahan pembangunan sektor pertanian antara lain :

- a. Tuntutan pemenuhan kebutuhan pangan seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk;
- b. Tingkat penerapan revolusi industri 4.0 bidang pertanian yang masih rendah;
- c. Semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
- d. Aspek daya saing produk pertanian relatif rendah;
- e. Tingkat penerapan teknologi pertanian yang masih rendah;
- f. Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap pembiayaan;
- g. Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap pemasaran;
- h. Perubahan iklim yang tidak menentu yang dapat mengganggu produksi pertanian;
- i. Masih minimnya jumlah petani milenial;
- j. Kepemilikan luas lahan petani relatif sempit;
- k. Belum optimalnya infrastruktur pertanian;
- l. Meningkatnya gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
- m. Menurunnya daya dukung sumber daya alam yang mengakibatkan degradasi lahan.

Berbagai permasalahan mendasar tersebut menjadi isu-isu strategis pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Gresik. Kedepannya, isu strategis harus diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan pertanian karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan pembangunan pertanian

2.3.3 Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program Nasional

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Gresik sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029 menjadi pedoman utama penyelenggaraan pembangunan daerah, termasuk sektor pertanian.

Sektor pertanian merupakan salah satu penggerak utama perekonomian daerah dan berperan strategis dalam mewujudkan Nawaksara “Gresik Agropolitan” yakni pembangunan pertanian maju, mandiri, dan berkelanjutan yang meningkatkan kesejahteraan petani serta mendukung ketahanan pangan nasional.

1. Dampak terhadap Daerah (Internal):
 - Meningkatnya kesejahteraan petani dan produktivitas sektor pertanian.
 - Terbentuknya sistem pelayanan publik pertanian yang efisien dan transparan.
 - Terjaganya ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan di wilayah Gresik.
2. Dampak terhadap Nasional (Eksternal):
 - Berkontribusi pada penurunan ketimpangan produksi pangan antar daerah.
 - Menopang target Transformasi Ekonomi Berbasis Pertanian dalam RPJMN.
 - Mendukung pencapaian SDGs 2 (Tanpa Kelaparan) dan SDGs 8 (Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi).
3. Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati:
 - Kinerja pelayanan yang berorientasi hasil memperkuat pencapaian visi daerah “Maju, Mandiri, dan Sejahtera.”
 - Mendukung Misi 2 (Produktivitas & Daya Saing Ekonomi) dan Misi 5 (Pembangunan Berkelanjutan).

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2024 telah secara nyata memberikan kontribusi terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terutama dalam peningkatan produktivitas ekonomi pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Capaian tersebut berdampak langsung terhadap Program Nasional di bidang ketahanan pangan, pemberdayaan petani, transformasi pertanian modern, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, pelayanan publik Dinas Pertanian tidak hanya memperkuat kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menjadi bagian integral dalam mewujudkan pembangunan pertanian nasional yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Pembangunan pertanian ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Permasalahan-permasalahan tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Dinas Pertanian Gresik. Tantangan yang paling nyata dihadapi pada masa yang akan datang adalah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, kebutuhan pangan yang semakin meningkat, alih fungsi lahan pertanian yang semakin bertambah, status dan luas kepemilikan lahan, pendidikan dan usia petani, kemiskinan perdesaan, dampak disrupsi revolusi industri 4.0 disusul dengan revolusi industri 5.0 yang terus melaju beriringan dengan perkembangan teknologi di sekitar, Dampak Perubahan Iklim (DPI), Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), dan juga keterbatasan akses pembiayaan dan pemasaran produk bagi petani.

Pembangunan pertanian berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh faktor produksi saja, namun juga berkaitan dengan pembangunan lainnya seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan di dalam negeri. Proses pembangunan yang dilaksanakan perlu memerhatikan potensi maupun peluang dalam pembangunan pertanian berkelanjutan agar tantangan dan kelemahan yang dihadapi menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi. Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dinas Pertanian antara lain potensi area pertanian di Kabupaten Gresik yang masih cukup luas, adanya kelembagaan petani diantaranya gapoktan dan poktan yang perlu difasilitasi dan peluang pasar yang besar untuk komoditas

pertanian.

2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Di rencanakan

Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian adalah :

1. Peningkatan ketahanan pangan keluarga sebagai upaya peningkatan ketersediaan pangan yang merupakan salah satu komponen dari IKU Dinas Pertanian.
2. Upaya pemberdayaan masyarakat dan perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat menuju pola pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) perlu terus dilakukan dalam rangka meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang merupakan salah satu Sasaran Daerah, dimana Dinas Pertanian adalah OPD utama pengampu sasaran tersebut.
3. Pengawasan mutu, stok pasokan, harga pangan, dan keamanan pangan hasil pertanian, peternakan perlu terus dilakukan.
4. Pencegahan dan pengendalian penyakit yang bersumber dari hewan (zoonosis) perlu terus dilakukan.
5. Pengembangan Dinas Pertanian dan Pangan sebagai pusat layanan perbenihan, edukasi dan penelitian sekaligus penyedia sarana wisata (Agrowisata) masih perlu ditingkatkan.
6. Penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan untuk mendukung produktivitas.
7. Perencanaan pengendalian dan penanggulangan bencana agar tetap menjaga keberlangsungan produksi.

Berdasarkan rencana strategis Dinas Pertanian tahun 2025-2029 rekomendasi strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Penguatan ketahanan pangan dan produksi pertanian melalui intensifikasi, ekstensifikasi, serta perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
2. Modernisasi pertanian berbasis inovasi dan teknologi guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing.
3. Penguatan kelembagaan petani, penyuluhan, dan SDM pertanian untuk mendorong kemandirian dan profesionalisme petani.

4. Pengembangan hilirisasi, nilai tambah, dan akses pasar melalui pengolahan hasil pertanian, pemasaran digital, dan kemitraan usaha.
5. Pengendalian inflasi pangan strategis dengan menjaga stabilitas produksi, distribusi, dan harga komoditas pertanian.
6. Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian untuk mendukung efisiensi usaha tani.
7. Pembangunan pertanian berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan ramah lingkungan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025 dimaksudkan untuk membandingkan antaramusanan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2025.

Hasil review antara rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan rancangan awal RKPD dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD adalah tidak terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD.

Tabel 2.3 T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Gresik
Dinas Pertanian

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian 2026	Pagu Indikatif	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian 2026	Kebutuhan Dana	Cata tan Pent ing
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL DINAS PERTANIAN (Penjumlahan Dinas Pertanian dan UPT)					TOTAL DINAS PERTANIAN (Penjumlahan Dinas Pertanian dan UPT)					
TOTAL DINAS PERTANIAN (Penjumlahan Urusan Pangan dan Urusan Pertanian)					TOTAL DINAS PERTANIAN (Penjumlahan Urusan Pangan dan Urusan Pertanian)					
DINAS PERTANIAN					DINAS PERTANIAN					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Pertanian	Jumlah Produksi Pangan Lokal	>190000		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Pertanian	Jumlah Produksi Pangan Lokal	>190000		
		Persentase Jumlah Cadangan Pangan	50%				Persentase Jumlah Cadangan Pangan	50%		
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah Ketersediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	6 unit		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah Ketersediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	6 unit		
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	6 Unit	11,660,000	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	6 Unit	11,660,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Dinas Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Dinas Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	Dinas Pertanian	Pertumbuhan Pola Pangan Harapan	0.62%		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	Dinas Pertanian	Pertumbuhan Pola Pangan Harapan	0.62%		

PANGAN MASYARAKAT					PANGAN MASYARAKAT					
		Persentase rumah tangga yang menerapkan pola konsumsi B2SA	>45%				Persentase rumah tangga yang menerapkan pola konsumsi B2SA	>45%		
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Pertanian	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Ragka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	12 laporan		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Pertanian	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Ragka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	12 laporan		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	12 laporan	80,220,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	12 laporan	80,220,000	
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Dinas Pertanian	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2 unit	13,120,000	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Dinas Pertanian	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2 unit	13,120,000	

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Dinas Pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 dokumen	24,770,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Dinas Pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 dokumen	24,770,000	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dinas Pertanian	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	120 keluarga	10,000,000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dinas Pertanian	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	120 keluarga	10,000,000	
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kabupaten/Kota	1 laporan	10,000,000	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kabupaten/Kota	1 laporan	10,000,000	
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Dinas Pertanian	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	0		Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Dinas Pertanian	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	0		
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dinas Pertanian	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	27,568,400	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dinas Pertanian	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	27,568,400	
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Dinas Pertanian	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Dinas Pertanian	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan		

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Pertanian	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	40,092,000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Pertanian	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	40,092,000	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Pertanian	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	>18 %		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Pertanian	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	>18 %		
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dinas Pertanian	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1 Dokumen		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dinas Pertanian	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1 Dokumen		
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dinas Pertanian	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	33,840,000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dinas Pertanian	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	33,840,000	
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan		

Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2,320,392,000	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2,320,392,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 laporan	20,040,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 laporan	20,040,000	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Pertanian	Persentase Keamanan Pangan Segar	87%		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Pertanian	Persentase Keamanan Pangan Segar	87%		
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan		
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20,000,000	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20,000,000	

Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dinas Pertanian	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen		Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dinas Pertanian	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen		
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	112,618,360	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	112,618,360	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pertanian	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pertanian	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	100%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen		

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen	35,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen	35,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	15,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	12 laporan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	12 laporan		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pertanian	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/bulan	14,603,922,812.83	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pertanian	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/bulan	14,603,922,812.83	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	90 Dokumen	6,633,472	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	90 Dokumen	6,633,472	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	6 laporan	1,950,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	6 laporan	1,950,000	

		Keuangan Akhir Tahun SKPD					Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Pertanian	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen	1,625,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Pertanian	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen	1,625,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengadministrasian umum perangkat daerah	12 laporan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengadministrasian umum perangkat daerah	12 laporan		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	133,144,016	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	133,144,016	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	86,584,960	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	86,584,960	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	10,662,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	10,662,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 laporan	373,628,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 laporan	373,628,500	

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	141,138,700	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	141,138,700	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	333,720,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	333,720,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	93 laporan	2,456,270,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	93 laporan	2,456,270,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 unit		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 unit		

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Pertanian	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	40,610,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Pertanian	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	40,610,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Pertanian	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	124,896,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Pertanian	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	124,896,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	60,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	60,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	330,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	330,000,000	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian	Persentase Realisasi Pupuk Bersubsidi	90%		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian	Persentase Realisasi Pupuk Bersubsidi	90%		
		Persentase Alsintan dalam Kondisi Baik	>90%				Persentase Alsintan dalam Kondisi Baik	>90%		

Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3 laporan		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3 laporan		
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 laporan	2,019,352,300	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 laporan	2,019,352,300	
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 laporan	6,308,961,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 laporan	6,308,961,000	
Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Dinas Pertanian	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1 Ton	10,000,000	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Dinas Pertanian	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1 Ton	10,000,000	
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan		

Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Dinas Pertanian	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 laporan	461,554,600	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Dinas Pertanian	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 laporan	461,554,600	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Lahan KP2B yang Mendapatkan Insentif Prasarana Pertanian	50.97%		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Lahan KP2B yang Mendapatkan Insentif Prasarana Pertanian	50.97%		
		Persentase Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Instruktur Pertanian	33.3%				Persentase Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Instruktur Pertanian	33.3%		
Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Pertanian	4 Laporan		Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Pertanian	4 Laporan		
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 laporan	88,855,300	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 laporan	88,855,300	
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian				34,296,000	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian				34,296,000	

		Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	38.598 Ha				Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	38.598 Ha		
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Dinas Pertanian	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	4005 Unit	408,677,900	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Dinas Pertanian	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	4005 Unit	408,677,900	
Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L P2B	1 Dokumen		Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L P2B	1 Dokumen		
Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpelihara	8 unit		Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpelihara	8 unit		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Dinas Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	0		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Dinas Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	0		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	0		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	0		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang Dibangun,	Dinas Pertanian	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang Dibangun,	0		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta	Dinas Pertanian	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang Dibangun,	0		

sarana pendukungnya		Direhabilitasi, dan Dipelihara			sarana pendukungnya		Direhabilitasi, dan Dipelihara			
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 unit	2,921,549,476	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 unit	2,921,549,476	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dinas Pertanian	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	0		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dinas Pertanian	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	0		
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 unit	1,891,606,079.17	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 unit	1,891,606,079.17	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	>90%		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	>90%		
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan		

Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Dinas Pertanian	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	1 Dokumen	193,006,000	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Dinas Pertanian	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	1 Dokumen	193,006,000	
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	0	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	0	
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan		
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Dinas Pertanian	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 laporan	1,530,000	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Dinas Pertanian	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 laporan	1,530,000	

Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	3 laporan		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	3 laporan		
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Dinas Pertanian	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 laporan	50,592,600	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Dinas Pertanian	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 laporan	50,592,600	
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	9,320,000	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	9,320,000	
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Dinas Pertanian	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	2 unit usaha	1,500,000	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Dinas Pertanian	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	2 unit usaha	1,500,000	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Pertanian	Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	92%		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Pertanian	Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	92%		

		Persentase Penanganan Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	95%				Persentase Penanganan Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	95%		
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	555 Ha			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	555 Ha	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dinas Pertanian	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	165 Ha	235,370,000		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dinas Pertanian	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	165 Ha	235,370,000
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dinas Pertanian	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	390 ha	680,585,463		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dinas Pertanian	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	390 ha	680,585,463
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Dinas Pertanian	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian yang diterbitkan	100%			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Dinas Pertanian	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian yang diterbitkan	100%	

Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen		
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dinas Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	12,160,000	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dinas Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	12,160,000	
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Dinas Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 laporan	8,800,000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Dinas Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 laporan	8,800,000	
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	1 laporan		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	1 laporan		

Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Dinas Pertanian	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	1 laporan	4,840,000	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Dinas Pertanian	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	1 laporan	4,840,000	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian	Persentase Kelompok Tani Semua Jenjang Naik Kelas	2.98%		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian	Persentase Kelompok Tani Semua Jenjang Naik Kelas	2.98%		
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3 laporan		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3 laporan		
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16 unit		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16 unit		
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di	Dinas Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang	302 unit	922,880,324	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di	Dinas Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang	302 unit	922,880,324	

Kecamatan dan Desa		Ditingkatkan Kapasitasnya			Kecamatan dan Desa		Ditingkatkan Kapasitasnya			
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0		
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	0		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	0		
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dinas Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 Dokumen	309,625,000	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dinas Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 Dokumen	309,625,000	
TOTAL UPT					TOTAL UPT					
UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng					UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng					
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Dinas Pertanian	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Dinas Pertanian	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	100%		

DAERAH KABUPATEN/KOTA					DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengadministrasian umum perangkat daerah	3 Dokumen		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengadministrasian umum perangkat daerah	3 Dokumen		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1,190,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1,190,500	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,149,120	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,149,120	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1,627,200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1,627,200	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9,918,500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9,918,500	

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	>90%		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	>90%		
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan		
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 laporan	84,142,780	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 laporan	84,142,780	
UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggang					UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggang					
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pertanian	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pertanian	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	100%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengadministrasian umum perangkat daerah	3 Dokumen		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengadministrasian umum perangkat daerah	3 Dokumen		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1,860,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1,860,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	2,381,400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	2,381,400	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1,470,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1,470,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan		

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	9,987,500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	9,987,500	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	>90%		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	>90%		
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan		
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 laporan	99,390,400	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 laporan	99,390,400	
UPT Taman Teknologi Pertanian					UPT Taman Teknologi Pertanian					

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pertanian	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pertanian	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	100%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengadministrasian umum perangkat daerah	3 Dokumen		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengadministrasian umum perangkat daerah	3 Dokumen		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	3,208,064	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	3,208,064	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	3,579,600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	3,579,600	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	2,640,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	2,640,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	12 laporan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	12 laporan		

		Pemerintahan Daerah					Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pertanian	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	66,373,200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pertanian	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	66,373,200	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 unit		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	24,186,298	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	24,186,298	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian	Persentase Realisasi Pupuk Bersubsidi	90%		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian	Persentase Realisasi Pupuk Bersubsidi	90%		
		Persentase Alsintan dalam Kondisi Baik	>90%				Persentase Alsintan dalam Kondisi Baik	>90%		
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Dinas Pertanian	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	12 Dokumen		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Dinas Pertanian	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	12 Dokumen		

Kewenangan Kabupaten/Kota		Kewenangan Kabupaten/Kota			Kewenangan Kabupaten/Kota		Kewenangan Kabupaten/Kota			
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	12 dokumen	148,246,280	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	12 dokumen	148,246,280	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian	Persentase Lahan KP2B yang Mendapatkan Insentif Prasarana Pertanian	50.97%		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian	Persentase Lahan KP2B yang Mendapatkan Insentif Prasarana Pertanian	50.97%		
		Persentase Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Instruktur Pertanian	33.3%				Persentase Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Instruktur Pertanian	33.3%		
Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Pertanian	2 unit		Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Pertanian	2 unit		
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Dinas Pertanian	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 unit	13,532,658	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Dinas Pertanian	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 unit	13,532,658	
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Dinas Pertanian	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang	1 unit	38,233,900	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Dinas Pertanian	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang	1 unit	38,233,900	

		dikendalikan dan dimanfaatkan					dikendalikan dan dimanfaatkan			
Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpelihara	1 unit		Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpelihara	1 unit		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	1,690,519,800	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	1,690,519,800	
UPT Rumah Pemotongan Hewan					UPT Rumah Pemotongan Hewan					
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pertanian	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pertanian	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	100%		

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengadministrasian umum perangkat daerah	3 Dokumen		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengadministrasian umum perangkat daerah	3 Dokumen		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	4,068,100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	4,068,100	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	23,898,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	23,898,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan	29,103,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan	29,103,500	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	17,930,400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	17,930,400	

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian	Persentase Lahan KP2B yang Mendapatkan Insentif Prasarana Pertanian	50.97%		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian	Persentase Lahan KP2B yang Mendapatkan Insentif Prasarana Pertanian	50.97%		
		Persentase Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Instruktur Pertanian	33.3%				Persentase Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Instruktur Pertanian	33.3%		
Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpelihara	0		Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpelihara	0		
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	0	1,891,606,079.17	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	0	1,891,606,079.17	
UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian di Bawean					UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian di Bawean					
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pertanian	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pertanian	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	100%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengadministrasi an umum perangkat daerah	3 dokumen		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengadministrasi an umum perangkat daerah	3 dokumen		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1,555,880	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1,555,880	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	2,388,900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	2,388,900	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	8,600,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	8,600,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan		

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12,455,220	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12,455,220	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 unit		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Dinas Pertanian Kabupaten Gresik melakukan penelaahan terhadap berbagai usulan program dan kegiatan yang disampaikan melalui hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Kecamatan, Pokok-pokok Pikiran DPRD, serta masukan dari kelompok tani dan pelaku usaha pertanian.

Penelaahan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara usulan masyarakat dengan prioritas pembangunan pertanian daerah, ketersediaan anggaran, serta kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik. Adapun usulan program/kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 sebagaimana terinci dalam tabel 2.4

Table 2.4 (Tabel T-C.32)
Usulan Proram dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gresik
Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanian

N o	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran/Volu me	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN				
1	Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Pangan	Kab Gresik	Jumlah Produksi	1 laporan	Dokumen data produksi tanaman pangan
			Jumlah Pertemuan Pendukung Kegiatan	2 pertemuan	2 kali bimbingan teknis peningktan produksi tanaman pangan
			Jumlah Sarana Produksi tanaman Pangan	2 unit	2 unit alat mesin budidaya tanaman pangan
			Jumlah Kawasan yang terbentuk	2 kawasan	2 kawasan komoditas tanaman pangan

2	Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Hortikultura	Kab Gresik	Jumlah Produksi	1 laporan	Dokumen data produksi tanaman Hortikultura
			Jumlah Pertemuan Pendukung Kegiatan	2 pertemuan	2 kali bimbingan teknis peningktan produksi tanaman Hortikultura
			Jumlah Sarana Produksi tanaman Pangan	2 unit	2 unit alat mesin budidaya tanaman pangan
			Jumlah Kawasan yang terbentuk	2 kawasan	2 kawasan komoditas tanaman Hortikultura
3	Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Perkebunan	Kab Gresik	Jumlah Produksi	1 laporan	Dokumen data produksi tanaman Hortikultura
			Jumlah Pertemuan Pendukung Kegiatan	2 pertemuan	2 kali bimbingan teknis peningktan produksi tanaman Perkebunan
			Jumlah Sarana Produksi tanaman Pangan	2 unit	2 unit alat mesin budidaya tanaman Perkebunan
			Jumlah Kawasan yang terbentuk	2 kawasan	2 kawasan komoditas tanaman Perkebunan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan antara Kebijakan nasional dalam hal ini Kementerian Pertanian RI dengan Rencana Kerja Dinas Pertanian yang tercantum dalam renstra dinas pertanian 2025–2029 disusun dengan mengacu pada berbagai kebijakan nasional, antara lain:

- RPJPN 2025–2045 (UU No. 59 Tahun 2024) dan RPJMN 2025–2029 (Perpres No. 12 Tahun 2025) yang menekankan pada ketahanan pangan, transformasi ekonomi berbasis nilai tambah sektor pertanian, dan penguatan SDM pertanian.
- UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai dasar pengendalian konversi lahan dan pemenuhan ketersediaan pangan.
- UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang TPB/SDGs, yang menegaskan pentingnya pemberdayaan petani dan ketahanan sistem pangan berkelanjutan.
- Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang mengharuskan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah.

Dengan demikian, arah kebijakan pertanian Kabupaten Gresik telah sejalan dengan orientasi pembangunan pertanian nasional yang menekankan kedaulatan pangan, pemberdayaan petani, inovasi teknologi, dan keberlanjutan ekosistem pertanian. Kesesuaian dan Implementasi di Tingkat Daerah dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik menerjemahkan kebijakan nasional tersebut ke dalam konteks lokal melalui strategi dan arah kebijakan yang mencakup:

- Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan lokal (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) selaras dengan prioritas nasional “Peningkatan Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan”.
- Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) untuk menjaga keberlanjutan produksi di tengah tekanan alih fungsi lahan.

- Penguatan kelembagaan petani dan penyuluh, sesuai amanat nasional tentang peningkatan kapasitas SDM pertanian dan modernisasi penyuluhan.
- Pemanfaatan teknologi pertanian modern dan digitalisasi data pertanian, mendukung agenda nasional transformasi digital sektor pertanian.
- Pengendalian inflasi pangan daerah dan stabilisasi harga, sejalan dengan kebijakan nasional menjaga stabilitas pangan dan daya beli masyarakat.

Meskipun arah kebijakan daerah telah terintegrasi dengan kebijakan nasional, Analisis Kritis terhadap Sinkronisasi Kebijakan terdapat beberapa tantangan masih perlu diperhatikan:

- Kesenjangan implementasi antara target nasional dengan kapasitas daerah (terutama dalam pendanaan, teknologi, dan SDM pertanian).
- Alih fungsi lahan masih menjadi ancaman yang perlu dikendalikan lebih ketat melalui pengawasan LP2B.
- Sinergi antar instansi pusat–provinsi–kabupaten masih memerlukan penguatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program lintas sektor (pangan, irigasi, infrastruktur pertanian).
- Perlu penguatan inovasi lokal agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan sesuai karakteristik agroekosistem Gresik (pesisir dan dataran rendah).

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama periode perencanaan, sebagai penjabaran dari visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah. Tujuan ini juga selaras dengan arah kebijakan pembangunan pertanian nasional dan provinsi, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 serta RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan daerah melalui peningkatan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gresik.
2. Meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah komoditas unggulan pertanian, perkebunan, hortikultura, dan peternakan melalui

penguatan inovasi teknologi, pengelolaan lahan yang optimal, serta peningkatan daya saing hasil pertanian.

3. Meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pertanian dengan memperkuat kelembagaan ekonomi petani, memperluas akses terhadap modal dan pasar, serta mendorong pengembangan usaha tani berorientasi agribisnis.
4. Menjamin keberlanjutan sumber daya pertanian dengan melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), menjaga kualitas lingkungan hidup, dan menerapkan sistem pertanian berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik bidang pertanian melalui penerapan sistem perencanaan, pelaporan, dan digitalisasi data pertanian yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sasaran merupakan hasil yang terukur dari pencapaian tujuan, yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik. Sasaran yang ditetapkan juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan sektor pertanian selama tahun berjalan. Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan pangan yaitu Meningkatnya ketersediaan dan stabilitas pangan daerah dengan Indikator: Rasio ketersediaan pangan utama (kg/kapita/tahun), stabilitas harga pangan utama dengan Target: Ketersediaan pangan mencapai ≥ 190 kg/kapita/tahun dan stabilitas harga pangan di atas 95%.
2. Meningkatnya produksi sektor pertanian dalam hal ini Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas unggulan pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan Indikator: Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan..
3. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani dengan indikator Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (%)
4. Meningkatnya pengendalian inflasi sektor pertanian dengan indikator Stabilitas Harga Pangan Utama

3.2 Program dan Kegiatan

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan sebagaimana tersebut pada Bab 3.2, maka untuk mendukung tercapainya Rangkaian program, kegiatan,

dan sub kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2026 diarahkan untuk: mendukung Nawaksara “Gresik Agropolitan”, memperkuat sistem produksi pangan dan pertanian berkelanjutan, mendorong inovasi teknologi dan kelembagaan pertanian modern, serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan nilai tambah dan efisiensi usaha tani. dengan pelaksanaan yang terukur dan kolaboratif, Dinas Pertanian Kabupaten Gresik diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama pembangunan ekonomi berbasis pertanian yang produktif, modern, dan berkelanjutan. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik bertanggung jawab dalam mewujudkan Nawakarsa ke 4 (empat) Gresik Agropolitan. Penjabaran Nawa Karsa Gresik Agropolitan dirumuskan dalam output kunci:

1. Gresik Agropolitan GOTani (Gresik Ayo Bertani) Menjamin kesejahteraan petani dengan memastikan ketersediaan pupuk dan pemberian asuransi,
2. Peningkatan Kualitas RPH (Rumah Program penambahan dan revitalisasi RPH dan RPU Program penambahan dan revitalisasi RPH dan RPU,
3. Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Alternatif Pengembangan komoditas tanaman perkebunan contoh tembakau di Bawean, dan biofarmaka.

Ketiga output kunci nawakarsa tersebut di dukung Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian ,Program Penyuluhan Pertanian serta Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat (Sumber : RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029).

Tabel 3.1 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Perangkat Daerah/ Program	Lokasi	Indikator	Satuan	2026			Catatan Penting	2027				
					Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp (dalam ribuan)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp (dalam ribuan)			
Dinas Pertanian													
2													

2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Gresik	Persentase Jumlah Cadangan Pangan							
2	9	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Gresik	Jumlah Ketersediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan		>190000				>190000	43,606.00
							Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Persen	0.5				50	
2	9	2	2	01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan	Gresik	Pertumbuhan Pola Pangan Harapan	unit	6				6	43,606.00

					n Daerah Kabupaten /Kota									
2	9	2	2 0 1	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Gresik		Unit	6	6,310.00	APBD		6	33,106 .00
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Gresik	Pertumbuhan Pola Pangan Harapan	Persen	0.62				0.63	318,55 2.00
							Persentase rumah tangga yang menerapkan pola konsumsi B2SA	Persen	>45				50	

2	9	3	2 0 1		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten /Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Gresik	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Ragka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	laporan	12				12	248,55 2.00
2	9	3	2 0 1	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Gresik	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan	12	54,000.00	APBD		12	79,552 .00
2	9	3	2 0 1	7	Peningkatan Ketahanan	Gresik	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan	keluarga	120	20,000.00	APBD		120	25,000 .00

					Pangan Keluarga		ketahanan pangan keluarga							
2	9	3	2 0 1	8	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten /Kota	Gresik	Jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kabupaten/ Kota	laporan	1	15,000.00	APBD		1	12,000 .00
2	9	3	2 0 1	1 0	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten /kota	Gresik	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	unit	2	20,000.00	APBD		2	65,000 .00
2	9	3	2 0 1	1 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Gresik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan	dokumen	1	-			1	30,000 .00

					Pokok Strategis		Pokok Strategis							
2	9	3	2 · 0 1	1 6	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Gresik	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	1	13,784.20	APBD		1	37,000 .00
2	9	3	2 · 0 4		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Gresik	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1				1	70,000 .00
2	9	3	2 · 0 4	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis	Gresik	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan	laporan	1	54,266.00	APBD		1	70,000 .00

					Sumber Daya Lokal		Berbasis Sumber Daya Lokal							
2	9	4			PROGRAM PENANGAN AN KERAWAN AN PANGAN	Gresik	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	>18				>20	121,80 8.00
2	9	4	2 · 0 1		Penyusuna n Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Gresik	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dokumen	1				1	37,000 .00
2	9	4	2 · 0 1	1	Penyusuna n, Pemutakhir an dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Gresik	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokumen	1	16,678.90	APBD		1	37,000 .00
2	9	4	2 ·		Penangana n Kerawanan	Gresik	Jumlah Penanganan Kerawanan	Laporan	2				2	84,808 .00

			0 2	Pangan Kewenanga n Kabupaten /Kota		Pangan Kewenangan Kabupaten/K ota							
2	9	4	2 · 0 2	2 Pelaksanaa n Pengadaan, Pengelolaan , dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Gresik	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	Dokumen	1	262,834.00	APBD		1	59,808 .00
2	9	4	2 · 0 2	3 Koordinasi dan Sinkronisas i Penangana n Kerawanan Pangan dan Gizi	Gresik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi	laporan	1	10,020.00	APBD		1	25,000 .00

					Kabupaten /Kota		kabupaten/kota							
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Gresik	Persentase Keamanan Pangan Segar	Persen	86.66666667				89	61,839.00
2	9	5	2 0 1		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten /Kota	Gresik	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	laporan	12				14	61,839.00
2	9	5	2 0 1	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	Gresik	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	15,100.00	APBD		1	20,839.00

2	9	5	2 0 1	7	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	Gresik	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	48,733.49	APBD		1	30,000.00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Gresik								
3	2 7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Gresik								
3	2 7	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Gresik	Persentase Realisasi Pupuk Bersubsidi	Persen	90				90	14,552,347.00
							Persentase Alsintan dalam Kondisi Baik	Persen	>90				>90	

3	2	2	2	0	1	Pengawasa n Penggunaa n Sarana Pertanian	Gresik	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	laporan	3					3	14,205 ,847.0 0
3	2	2	2	0	1	Pengawasa n Penggunaa n Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Gresik	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	laporan	2	2,019,352.3 0	APBD			2	2,019, 352.30
3	2	2	2	0	1	Pendampin gan Penggunaa n Sarana Pendukung Pertanian	Gresik	Jumlah Pendampinga n Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	laporan	1	498,012.00	APBD			1	12,171 ,494.7 0
3	2	2	2	0	1	Perbanyak an Benih Bersertifika t Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Gresik	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih	Ton	1	76,452.50	APBD			1.5	15,000 .00

							yang diperbanyak							
3	2 7	2	2 0 3		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Gresik	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil	laporan	1				1	346,50 0.00
3	2 7	2	2 0 3	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Gresik	Persentase Lahan KP2B yang Mendapatkan Insentif Prasarana Pertanian	Persen	51	193,526.26	APBD		1	346,50 0.00
3	2 7	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARAN	Gresik	Persentase Lahan KP2B yang Mendapatkan Insentif	Persen	51				52	2,894, 733.00

					A PERTANIAN		Prasarana Pertanian							
							Persentase Poktan/Gapo ktan yang Terfasilitasi Instruktur Pertanian	Persen	33				34	
3	2 7	3	2 · 0 1		Pengemban gan Prasarana Pertanian	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Pengembang an Prasarana Pertanian	Laporan	4				4	733,67 8.00
3	2 7	3	2 · 0 1	3	Koordinasi dan Sinkronisas i Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Gresik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	laporan	2	66,100.00	APBD		2	125,00 0.00
3	2 7	3	2 · 0 1	5	Pengendali an dan Pemanfaata n Kawasan Pertanian	Gresik	Luas kawasan pertanian yang termanfaatka n	Ha	38,598	22,138.00	APBD		38,598	50,000 .00

3	2	3	2	7	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Gresik	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	4005	408,677.90	APBD		4000	408,678.00
3	2	3	2	0	Pembangunan Prasarana Pertanian	Gresik	Jumlah Prasarana Pertanian yang Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpelihara	unit	8				13	2,161,055.00
3	2	3	2	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Gresik	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	7	2,033,709.48	APBD		7	661,055.00
3	2	3	2	0	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasional	Gresik	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit	1	-			1	500,000.00

					isasi Rumah Potong Hewan		serta beroperasi							
3	2 7	4			PROGRAM PENGENDA LIAN KESEHATA N HEWAN DAN KESEHATA N MASYARAK AT VETERINE R	Gresik	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Persen	>90				>90	108,35 2.00
3	2 7	4	2 0 1		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten /Kota	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah	laporan	1				1	57,352 .00

							Kabupaten/Kota							
3	2 7	4	2 0 1	7	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Gresik	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	Dokumen	1	49,630.14	APBD		1	36,352.00
3	2 7	4	2 0 2		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Gresik	Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	laporan	1				1	10,000.00
3	2 7	4	2 0 2	4	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan	Gresik	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau	laporan	1	1,530.00	APBD		1	10,000.00

					dan/atau Pengeluara n Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)		pengeluaran HPM							
3	2 7	4	2 · 0 4		Penerapan dan Pengawasa n Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Gresik	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	laporan	3				3	41,000 .00
3	2 7	4	2 · 0 4	2	Pengawasa n Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Gresik	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	laporan	1	37,145.60	APBD		1	20,000 .00
3	2 7	4	2 · 0 4	4	Pengujian Laboratoriu m Kesehatan Masyarakat Veteriner	Gresik	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	1	8,704.70	APBD		1	11,000 .00

3	2	4	2	1	Pengawasa n Unit Usaha Produk Hewan	Gresik	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	unit	2	1,500.00	APBD	2	10,000 .00
3	2	5			PROGRAM PENGENDA LIAN DAN PENANGGU LANGAN BENCANA PERTANIAN	Gresik	Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persen	92			93	613,74 2.00
							Persentase Penanganan Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persen	95			95	
3	2	5	2		Pengendali an dan Penanggula ngan Bencana Pertanian	Gresik	Jumlah Pengendalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian	Ha	555			552	613,74 2.00

					Kabupaten /Kota		Kabupaten/Kota							
3	2 7	5	2 · 0 1	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Gresik	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	165	160,305.23	APBD		165	167,000.00
3	2 7	5	2 · 0 1	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Gresik	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	ha	390	302,300.10	APBD		387	446,742.00
3	2 7	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Gresik	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian	Persen	100				100	50,172.00

							yang diterbitkan							
3	2 7	6	2 · 0 1		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Gresik	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2				2	35,172 .00
3	2 7	6	2 · 0 1	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Gresik	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	1	-			1	23,000 .00
3	2 7	6	2 · 0 1	5	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin	Gresik	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	laporan	1	2,693.10	APBD		1	12,172 .00

					Usaha Pertanian									
3	2 7	6	2 · 0 2		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemelihara an Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pas ar Hewan, Rumah Potong Hewan	Gresik	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	laporan	1				1	15,000 .00
3	2 7	6	2 · 0 2	6	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter	Gresik	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Pusk eswan	laporan	1	3,080.00	APBD		1	15,000 .00

					Hewan Mandiri/Pus keswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan		Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi							
3	2	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Gresik	Persentase Kelompok Tani Semua Jenjang Naik Kelas	Persen	3				4	1,077,391.00
3	2	7	2		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	laporan	3				5	1,077,391.00
3	2	7	2	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Gresik	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	302	935,660.32	APBD		302	752,391.00
3	2	7	2	9	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi	Gresik	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan	Dokumen	1	309,625.00	APBD		1	100,000.00

					dan Inovasi Pertanian		inovasi pertanian							
3	2 7	1			PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Gresik	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Persen	100				100	19,160 ,807.0 0
3	2 7	1	2 · 0 1		Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Gresik	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2				2	50,000 .00
3	2 7	1	2 · 0 1	1	Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Gresik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40	18,659.49	APBD		40	35,000 .00

3	2 7	1	2 · 0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Gresik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	20	15,000.00	APBD		20	15,000.00
3	2 7	1	2 · 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gresik	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	laporan	12				12	15,035,466.60
3	2 7	1	2 · 0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gresik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	156	15,476,711.43	APBD		170	15,025,258.32
3	2 7	1	2 · 0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan	Gresik	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	Dokumen	90	6,633.47	APBD		90	6,633.28

					Akuntansi SKPD		Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
3	2 7	1	2 · 0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Gresik	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	6	1,950.00	APBD		6	1,950.00
3	2 7	1	2 · 0 2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Gresik	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	6	1,625.00	APBD		6	1,625.00
3	2 7	1	2 · 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Gresik	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengadministrasian umum perangkat daerah	laporan	12				12	447,701.40

3	2	1	2 · 0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Gresik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5	65,326.22	APBD		5	112,557.42
3	2	1	2 · 0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Gresik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	3	43,222.56	APBD		3	56,584.96
3	2	1	2 · 0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Gresik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	48	5,640.50	APBD		4	15,260.72
3	2	1	2 · 0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Gresik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	48	373,628.50	APBD		48	117,125.00
3	2	1	2 · 0 6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Gresik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Dokumen	1	72,157.00	APBD		1	146,173.30

							Elektronik pada SKPD							
3	2 7	1	2 · 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12				12	3,031, 286.00
3	2 7	1	2 · 0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	2	333,720.00	APBD		2	333,72 0.00
3	2 7	1	2 · 0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	93	2,252,936.0 0	APBD		93	2,697, 566.00

3	2	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	15				15	596,353.00
3	2	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Gresik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	30,000.00	APBD		1	40,610.00
3	2	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Gresik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	unit	10	110,880.00	APBD		10	124,896.00

					Operasional atau Lapangan		Pajak dan Perizinannya							
3	2 7	1	2 0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Gresik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	3	30,060.00	APBD		3	45,419 .00
3	2 7	1	2 0 9	9	Pemelihara an/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gresik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	unit	1	171,357.00	APBD		1	385,42 8.00
UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng														
3					URUSAN PEMERINT AHAN PILIHAN	Gresik								
3	2 7				URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERTANIAN	Gresik								
3	2 7	4			PROGRAM PENGENDALI AN KESEHATAN	Gresik	Tingkat pengendalian penyakit hewan	Persen	>90				>90	15,503 .00

					Kabupaten /Kota		dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota							
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Gresik	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Persen	100				100	17,963.00
3	27	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Gresik	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengadministrasian umum perangkat daerah	Dokumen	3				3	8,044.50
3	27	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Gresik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1,190.50	APBD		1	2,576.37
3	27	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Gresik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	3,149.12	APBD		1	3,998.13

3	2	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Gresik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1,627.20	APBD	1	1,470.00
3	2	1	2	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12			12	9,918.50
3	2	1	2	8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	9,918.50	APBD	12	9,918.50
UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpangan													
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Gresik							

3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Gresik							
3	2	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Gresik	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Persen	>90			>90	15,503.00
3	2	4	2	0	1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten /Kota	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	laporan	12		12	15,503.00

3	2 7	4	2 0 1	8	Pemberanta san Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Gresik	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/k ota	laporan	1	49,695.20	APBD	1	15,503 .00
3	2 7	1			PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Gresik	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Persen	100			100	17,800 .00
3	2 7	1	2 0 6		Administra si Umum Perangkat Daerah	Gresik	Jumlah pelaksanaa n kegiatan pengadminist rasian umum perangkat daerah	Dokumen	3			3	7,812. 50

3	2	1	2 · 0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Gresik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1,860.00	APBD		1	2,961.10
3	2	1	2 · 0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Gresik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	2,381.40	APBD		1	3,381.40
3	2	1	2 · 0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Gresik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1,470.00	APBD		1	1,470.00
3	2	1	2 · 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12				12	9,987.50
3	2	1	2 · 0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	laporan	12	9,987.50	APBD		12	9,987.50

						Air dan Listrik yang Disediakan								
UPT Taman Teknologi Pertanian														
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Gresik								
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Gresik								
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Gresik	Persentase Realisasi Pupuk Bersubsidi	Persen	90				90	158,749.00
							Persentase Alsintan dalam Kondisi Baik	Persen	>90				>90	
3	27	2	202		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,	Gresik	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan,	Dokumen	12				12	158,749.00

					Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota							
3	27	2	202	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	12	148,246.28	APBD		12	158,749.00
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Gresik	Persentase Lahan KP2B yang Mendapatkan Insentif Prasarana Pertanian	Persen	51				52	75,056.00
							Persentase Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Instruktur Pertanian	Persen	33				34	
3	27	3	201		Pengembangan Prasarana Pertanian	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Pertanian	Unit	2				2	75,056.00

3	2 7	3	2 0 1	6	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Gresik	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	unit	1	13,532.66	APBD		1	36,822.00
3	2 7	3	2 0 1	8	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Gresik	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	unit	1	38,233.90	APBD		1	38,234.00
3	2 7	3	2 0 2		Pembangunan Prasarana Pertanian	Gresik	Jumlah Prasarana Pertanian yang Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpelihara	unit	1				1	-
3	2 7	3	2 0 2	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana	Gresik	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	1	84,819.40	APBD		1	-

					Pertanian Lainnya									
3	2 7	1			PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Gresik	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	unit	1					150,14 0.00
3	2 7	1	2 · 0 6		Administra si Umum Perangkat Daerah	Gresik	Jumlah pelaksanaa n kegiatan pengadminist rasian umum perangkat daerah	Dokumen	3				3	21,267 .00
3	2 7	1	2 · 0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Gresik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1,604.03	APBD		1	8,208. 00
3	2 7	1	2 · 0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Gresik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1,789.80	APBD		1	9,459. 00
3	2 7	1	2 ·	9	Penyelengg araan Rapat	Gresik	Jumlah Laporan Penyelenggar	laporan	12	1,320.00	APBD		12	3,600. 00

			06		Koordinasi dan Konsultasi SKPD		aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
3	27	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12				12	66,373.00
3	27	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Gresik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	66,373.20	APBD		12	66,373.00
3	27	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gresik	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	1				1	62,500.00

3	2	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gresik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	unit	1	12,093.15	APBD	1	62,500.00
UPT Rumah Pemotongan Hewan													
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Gresik							
3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Gresik							
3	2	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Gresik	Persentase Lahan KP2B yang Mendapatkan Insentif Prasarana Pertanian	Persen	51			52	2,042,926.00
							Persentase Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Instruktur Pertanian	Persen	33			34	

3	2	3	2		Pembangun an Prasarana Pertanian	Gresik	Jumlah Prasarana Pertanian yang Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpelihara	Unit	0				0	2,042, 926.00
3	2	3	2	1	Pembangun an, Rehabilitasi , Pemelihara an dan operasional isasi Rumah Potong Hewan	Gresik	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	0		52,000.00	APBD	0	2,042, 926.00
3	2	1			PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Gresik	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Persen	1				100	78,145 .00
3	2	1	2		Administra si Umum Perangkat Daerah	Gresik	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengadminist rasian umum	Dokumen	3				3	60,214 .60

							perangkat daerah							
3	2 7	1	2 · 0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Gresik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	7	2,942.10	APBD		7	4,068.10
3	2 7	1	2 · 0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Gresik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	15,148.00	APBD		1	27,200.00
3	2 7	1	2 · 0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Gresik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	5	9,005.00	APBD		5	28,946.50
3	2 7	1	2 · 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12				12	17,930.40

3	2 7	1	2 0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	17,930.40	APBD		12	17,930 .40
UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian di Bawean														
3					URUSAN PEMERINT AHAN PILIHAN	Gresik								
3	2 7				URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PERTANIAN	Gresik								
3	2 7	1			PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Gresik	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Persen	100				100	21,382 .00
3	2 7	1	2 0 6		Administra si Umum Perangkat Daerah	Gresik	Jumlah pelaksanaa n kegiatan pengadminist	dokumen	3				3	8,872. 00

							rasian umum perangkat daerah							
3	2 7	1	2 · 0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Gresik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1,555.88	APBD		1	1,555. 00
3	2 7	1	2 · 0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Gresik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	2,388.90	APBD		1	3,117. 00
3	2 7	1	2 · 0 6	9	Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Gresik	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	8,600.00	APBD		12	4,200. 00
3	2 7	1	2 · 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12				12	12,510 .00

3	2	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12,455.22	APBD		12	12,510 .00
---	---	---	---	---	---	--------	--	---------	----	-----------	------	--	----	---------------

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dinas Pertanian Kabupaten Gresik

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Lokasi	Indikator	Satuan	2026			Catatan Penting
									Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp (dalam ribuan)	Sumber Dana	
					Urusan Pangan							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Gresik	Jumlah Produksi Pangan Lokal					
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Gresik	Persentase Jumlah Cadangan Pangan					
2	9	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan	Gresik	Jumlah Ketersediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung	>190000	>190000			

					KEMANDIRIAN PANGAN		Kemandirian Pangan					
							Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Persen	0,5			
2	9	2	2,0 1		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Gresik	Pertumbuhan Pola Pangan Harapan	unit	6			
2	9	2	2,0 1	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Gresik		Unit	6	6.310,00	APBD	
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Gresik	Pertumbuhan Pola Pangan Harapan	Persen	0,62			

							Persentase rumah tangga yang menerapkan pola konsumsi B2SA	Persen	>45			
2	9	3	2,0 1		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Gresik	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Ragka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	laporan	12			
2	9	3	2,0 1	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Gresik	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan	12	54.000,00	APBD	
2	9	3	2,0 1	7	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Gresik	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	keluarga	120	20.000,00	APBD	

2	9	3	2,0 1	8	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Gresik	Jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kabupaten/Kota	laporan	1	15.000,00	APBD	
2	9	3	2,0 1	1 0	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Gresik	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	unit	2	20.000,00	APBD	
2	9	3	2,0 1	1 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Gresik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	dokumen	1	-		
2	9	3	2,0 1	1 6	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Gresik	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	1	13.784,20	APBD	
2	9	3	2,0 4		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Gresik	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1			

2	9	3	2,0 4	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Gresik	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	laporan	1	54.266,00	APBD	
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Gresik	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	>18			
2	9	4	2,0 1		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Gresik	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dokumen	1			
2	9	4	2,0 1	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Gresik	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	16.678,90	APBD	
2	9	4	2,0 2		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Gresik	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	2			

2	9	4	2,0 2	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Gresik	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	262.834,00	APBD	
2	9	4	2,0 2	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Gresik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	laporan	1	10.020,00	APBD	
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Gresik	Persentase Keamanan Pangan Segar	Persen	8,666,667			
2	9	5	2,0 1		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Gresik	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	laporan	12			
2	9	5	2,0 1	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Gresik	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	15.100,00	APBD	

2	9	5	2,0 1	7	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Gresik	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	48.733,49	APBD	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Gresik						
3	2 7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Gresik						
3	2 7	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Gresik	Persentase Realisasi Pupuk Bersubsidi	Persen	90			
							Persentase Alsintan dalam Kondisi Baik	Persen	>90			
3	2 7	2	2,0 1		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Gresik	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	laporan	3			
3	2 7	2	2,0 1	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Gresik	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,	laporan	2	2.019.352 ,30	APBD	

							Teknologi dan Spesifik Lokasi						
3	2 7	2	2,0 1	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Gresik	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	laporan	1	498.012,00	APBD		
3	2 7	2	2,0 1	3	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Gresik	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	1	76.452,50	APBD		
3	2 7	2	2,0 3		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Gresik	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	laporan	1				
3	2 7	2	2,0 3	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Gresik	Persentase Lahan KP2B yang Mendapatkan Insentif Prasarana Pertanian	Persen	51	193.526,26	APBD		
3	2 7	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Gresik	Persentase Lahan KP2B yang Mendapatkan Insentif Prasarana Pertanian	Persen	51				

						Persentase Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Instruktur Pertanian	Persen	33			
3	2 7	3	2,0 1		Pengembangan Prasarana Pertanian	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Pertanian	Laporan	4		
3	2 7	3	2,0 1	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Gresik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	laporan	2	66.100,00	APBD
3	2 7	3	2,0 1	5	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Gresik	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	38.598	22.138,00	APBD
3	2 7	3	2,0 1	7	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Gresik	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	4005	408.677,90	APBD
3	2 7	3	2,0 2		Pembangunan Prasarana Pertanian	Gresik	Jumlah Prasarana Pertanian yang Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpelihara	unit	8		

3	2 7	3	2,0 2	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Gresik	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	7	2.033.709,48	APBD	
3	2 7	3	2,0 2	1 5	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Gresik	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	unit	1	-		
3	2 7	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Gresik	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Persen	>90			
3	2 7	4	2,0 1		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	laporan	1			
3	2 7	4	2,0 1	7	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Gresik	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	Dokumen	1	49.630,14	APBD	

3	2 7	4	2,0 2		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Gresik	Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	laporan	1			
3	2 7	4	2,0 2	4	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Gresik	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	laporan	1	1.530,00	APBD	
3	2 7	4	2,0 4		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Gresik	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	laporan	3			
3	2 7	4	2,0 4	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Gresik	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	laporan	1	37.145,60	APBD	

3	2 7	4	2,0 4	4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Gresik	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	1	8.704,70	APBD	
3	2 7	4	2,0 4	1 0	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Gresik	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	unit	2	1.500,00	APBD	
3	2 7	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Gresik	Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persen	92			
							Persentase Penanganan Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persen	95			
3	2 7	5	2,0 1		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Gresik	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Ha	555			

3	2 7	5	2,0 1	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Gresik	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	165	160.305,23	APBD	
3	2 7	5	2,0 1	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Gresik	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	ha	390	302.300,10	APBD	
3	2 7	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Gresik	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	100			
3	2 7	6	2,0 1		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Gresik	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2			

3	2 7	6	2,0 1	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Gresik	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	1	-		
3	2 7	6	2,0 1	5	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Gresik	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	laporan	1	2.693,10	APBD	
3	2 7	6	2,0 2		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Gresik	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	laporan	1			

3	2 7	6	2,0 2	6	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Gresik	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	laporan	1	3.080,00	APBD	
3	2 7	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Gresik	Persentase Kelompok Tani Semua Jenjang Naik Kelas	Persen	3			
3	2 7	7	2,0 1		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	laporan	3			
3	2 7	7	2,0 1	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Gresik	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	302	935.660,32	APBD	

3	2 7	7	2,0 1	9	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Gresik	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Dokumen	1	309.625,00	APBD	
3	2 7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Gresik	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Persen	100			
3	2 7	1	2,0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Gresik	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2			
3	2 7	1	2,0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Gresik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40	18.659,49	APBD	
3	2 7	1	2,0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Gresik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	laporan	20	15.000,00	APBD	

							Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
3	2 7	1	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gresik	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	laporan	12				
3	2 7	1	2,0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gresik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	156	15.476.71 1,43	APBD		
3	2 7	1	2,0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Gresik	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	90	6.633,47	APBD		
3	2 7	1	2,0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Gresik	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	6	1.950,00	APBD		
3	2 7	1	2,0 2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Gresik	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	6	1.625,00	APBD		

3	2 7	1	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Gresik	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengadministrasian umum perangkat daerah	laporan	12			
3	2 7	1	2,0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Gresik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5	65.326,22	APBD	
3	2 7	1	2,0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Gresik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	3	43.222,56	APBD	
3	2 7	1	2,0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Gresik	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	48	5.640,50	APBD	
3	2 7	1	2,0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Gresik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	48	373.628,50	APBD	
3	2 7	1	2,0 6	1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Gresik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	72.157,00	APBD	

3	2 7	1	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12			
3	2 7	1	2,0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	2	333.720,00	APBD	
3	2 7	1	2,0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	93	2.252.936 ,00	APBD	
3	2 7	1	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	15			
3	2 7	1	2,0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Gresik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	unit	1	30.000,00	APBD	

							dan dibayarkan Pajaknya						
3	2 7	1	2,0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Gresik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	10	110.880,00	APBD		
3	2 7	1	2,0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Gresik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	3	30.060,00	APBD		
3	2 7	1	2,0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gresik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	171.357,00	APBD		
UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng													
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Gresik							
3	2 7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Gresik							

3	2 7	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Gresik	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Persen	>90			
3	2 7	4	2,0 1		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	laporan	1			
3	2 7	4	2,0 1	8	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Gresik	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	laporan	1	42.071,39	APBD	
3	2 7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Gresik	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Persen	100			

3	2 7	1	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Gresik	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengadministrasia n umum perangkat daerah	Dokumen	3			
3	2 7	1	2,0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Gresik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1.190,50	APBD	
3	2 7	1	2,0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Gresik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.149,12	APBD	
3	2 7	1	2,0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Gresik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1.627,20	APBD	
3	2 7	1	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12			
3	2 7	1	2,0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	9.918,50	APBD	

UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggan												
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Gresik						
3	2 7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Gresik						
3	2 7	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Gresik	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Persen	>90			
3	2 7	4	2,0 1		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	laporan	12			
3	2 7	4	2,0 1	8	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Gresik	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1	laporan	1	49.695,20	APBD	

							(satu) Daerah Kabupaten/kota					
3	2 7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Gresik	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Persen	100			
3	2 7	1	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Gresik	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengadministrasia n umum perangkat daerah	Dokumen	3			
3	2 7	1	2,0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Gresik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1.860,00	APBD	
3	2 7	1	2,0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Gresik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	2.381,40	APBD	
3	2 7	1	2,0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Gresik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1.470,00	APBD	

3	2 7	1	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12			
3	2 7	1	2,0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	9.987,50	APBD	
UPT Taman Teknologi Pertanian												
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Gresik						
3	2 7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Gresik						
3	2 7	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Gresik	Persentase Realisasi Pupuk Bersubsidi	Persen	90			
							Persentase Alsintan dalam Kondisi Baik	Persen	>90			
3	2 7	2	2,0 2		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Gresik	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,	Dokumen	12			

					Kewenangan Kabupaten/Kota		Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					
3	2 7	2	2,0 2	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	12	148.246,28	APBD	
3	2 7	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Gresik	Persentase Lahan KP2B yang Mendapatkan Insentif Prasarana Pertanian	Persen	51			
							Persentase Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Instruktur Pertanian	Persen	33			
3	2 7	3	2,0 1		Pengembangan Prasarana Pertanian	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Pertanian	Unit	2			
3	2 7	3	2,0 1	6	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Gresik	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	unit	1	13.532,66	APBD	

3	2 7	3	2,0 1	8	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Gresik	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	unit	1	38.233,90	APBD	
3	2 7	3	2,0 2		Pembangunan Prasarana Pertanian	Gresik	Jumlah Prasarana Pertanian yang Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpelihara	unit	1			
3	2 7	3	2,0 2	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Gresik	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	1	84.819,40	APBD	
3	2 7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Gresik	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	unit	1			
3	2 7	1	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Gresik	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengadministrasian umum perangkat daerah	Dokumen	3			
3	2 7	1	2,0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Gresik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1.604,03	APBD	

3	2 7	1	2,0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Gresik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1.789,80	APBD	
3	2 7	1	2,0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Gresik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	1.320,00	APBD	
3	2 7	1	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12			
3	2 7	1	2,0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Gresik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	66.373,20	APBD	
3	2 7	1	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gresik	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	1			
3	2 7	1	2,0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gresik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	unit	1	12.093,15	APBD	

							Dipelihara/Direhabilitasi						
UPT Rumah Pemotongan Hewan													
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Gresik							
3	2 7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Gresik							
3	2 7	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Gresik	Persentase Lahan KP2B yang Mendapatkan Insentif Prasarana Pertanian	Persen	51				
							Persentase Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Instruktur Pertanian	Persen	33				
3	2 7	3	2,0 2		Pembangunan Prasarana Pertanian	Gresik	Jumlah Prasarana Pertanian yang Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpelihara	Unit	0				
3	2 7	3	2,0 2	1 5	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Gresik	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	0	52.000,00	APBD		

3	2 7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Gresik	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Persen	1			
3	2 7	1	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Gresik	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengadministrasia n umum perangkat daerah	Dokumen	3			
3	2 7	1	2,0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Gresik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	7	2.942,10	APBD	
3	2 7	1	2,0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Gresik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	15.148,00	APBD	
3	2 7	1	2,0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Gresik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	5	9.005,00	APBD	
3	2 7	1	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12			

3	2 7	1	2,0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	17.930,40	APBD	
UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian di Bawean												
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Gresik						
3	2 7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Gresik						
3	2 7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Gresik	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	Persen	100			
3	2 7	1	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Gresik	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengadministrasian umum perangkat daerah	dokumen	3			
3	2 7	1	2,0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Gresik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1.555,88	APBD	

3	2 7	1	2,0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Gresik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	2.388,90	APBD	
3	2 7	1	2,0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Gresik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	8.600,00	APBD	
3	2 7	1	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12			
3	2 7	1	2,0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Gresik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12.455,22	APBD	

BAB V

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Undang - undang Nomor 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renja Dinas Pertanian Tahun 2026 selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2026;
2. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Pertanian Tahun 2026 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang pertanian, perkebunan dan peternakan terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahun 2026;
3. Renja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Tahun 2026;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini akan dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam renja ini.